

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 20, No. 2, Juni 2015

ISSN 0853-9316

- **PENYELESAIAN KONFLIK DI TANAH PAPUA DALAM PERSPEKTIF POLITIK**
oleh: Nomensen ST Mambraku
- **EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF 2014: STUDI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**
oleh: Indra Pahlevi
- **IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG SUMBER DAYA AIR**
oleh: Irfan Nur Rachman
- **TANTANGAN INTERNASIONALISASI UKM DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**
oleh: Indra Cahyadi
- **TELAAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN DI INDONESIA**
oleh: Lukman Adam
- **BAURAN KEBIJAKAN MONETER-FISKAL TERHADAP PENCAPAIAN TARGET INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**
oleh: Juli Panglima Saragih



Diterbitkan oleh
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 20, No. 2, Juni 2015

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i-ii
● PENYELESAIAN KONFLIK DI TANAH PAPUA DALAM PERSPEKTIF POLITIK <i>oleh: Nomensen ST. Mambraku</i>	75-85
● EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF 2014: STUDI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN BANGKA BELITUNG <i>oleh: Indra Pahlevi</i>	87-108
● IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG SUMBER DAYA AIR <i>oleh: Irfan Nur Rachman</i>	109-128
● TANTANGAN INTERNASIONALISASI UKM DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN <i>oleh: Indra Cahyadi</i>	129-143
● TELAAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN DI INDONESIA <i>oleh: Lukman Adam</i>	145-162
● BAURAN KEBIJAKAN MONETER-FISKAL TERHADAP PENCAPAIAN TARGET INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI <i>oleh: Juli Panglima Saragih</i>	163-182

PENGANTAR REDAKSI

Terbitnya *Jurnal Kajian*, Volume 20, Nomor 2, Juni 2015 merupakan kelanjutan dari edisi-edisi sebelumnya. *Jurnal Kajian* yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI adalah wadah bagi tulisan-tulisan ilmiah hasil kajian dan penelitian tentang masalah-masalah strategis guna menjembatani teori dan persoalan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Jurnal ini merupakan sarana bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi khususnya terkait dengan proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada edisi kali ini terdapat 6 (enam) tulisan yang mengupas beberapa persoalan yang dibahas secara padat oleh beberapa penulis yang menyangkut isu-isu strategis yakni tentang Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik, Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2014, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Sumber Daya Air, Tantangan Internasionalisasi UKM di Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Indonesia, serta Bauran Kebijakan Moneter-Fiskal Terhadap Pencapaian Target Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi.

Tulisan pertama disampaikan oleh Nomensen ST. Mambraku berjudul Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik. Menurut penulis ada beberapa fenomena yang terjadi di tanah Papua dengan segala permasalahannya. Pendekatan dan kebijakan yang diambil pemerintah pascareformasi patut dipertanyakan. Pendekatan dan kebijakan tersebut agaknya belum mampu menyelesaikan permasalahan di tanah Papua. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pola, arah, dan efektivitas penyelesaian konflik di tanah Papua pascareformasi.

Tulisan kedua disampaikan oleh Indra Pahlevi dengan judul Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2014: Studi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Bangka Belitung. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang mencoba mengurai berbagai persoalan tersebut dengan kasus di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Bangka Belitung. Berbagai persoalan tersebut harus diatasi dengan solusi yang komprehensif yang membutuhkan perhatian dari seluruh *stakeholders* melalui pemetaan masalah dan dibuat *standard operating procedure*-nya. Pada akhirnya harus dilakukan evaluasi melalui perbaikan aturan yang dikodifikasi antar UU tentang kepemiluan.

Tulisan ketiga disampaikan oleh Irfan Nur Rachman berjudul Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Sumber Daya Air. Menurut penulis pengujian atas UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air memiliki implikasi hukum. Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Sumber Daya Air memiliki beberapa implikasi hukum, yaitu pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perairan yang telah dicabut, perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah, dan adanya perumusan konsep penguasaan negara tentang pengelolaan sumber daya air berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013.

Tulisan keempat disampaikan oleh Indra Cahyadi yang berjudul Tantangan Internasionalisasi UKM di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa berbagai permasalahan yang dihadapi oleh UKM Indonesia dalam proses internasionalisasi dan persiapan menuju MEA 2015. Pertama, mengapa keterlibatan UKM Indonesia di pasar internasional masih relatif rendah dibandingkan dengan UKM dari negara lain di Asia? Hal yang menarik dipertanyakan karena, meskipun komitmen pemerintah Indonesia terhadap UKM cukup tinggi, tingkat internasionalisasi UKM masih rendah. Oleh karena itu, permasalahan kedua yang akan dibahas adalah rekomendasi bagi UKM ditengah upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan UKM guna menghadapi MEA 2015.

Tulisan kelima ditulis oleh Lukman Adam berjudul Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Indonesia. Indonesia memiliki potensi laut dan perairan yang sangat besar, termasuk di dalamnya potensi sumber daya ikan yang banyak dimanfaatkan oleh nelayan dan pembudi daya ikan. Namun, potensi tersebut tidak berbanding lurus dengan kehidupan pelaku usahanya. Nelayan dan pembudi daya ikan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, dan untuk meningkatkan status ekonominya diperlukan perlakuan khusus melalui sejumlah instrumen perlindungan.

Tulisan keenam atau terakhir ditulis oleh Juli Panglima Saragih dengan judul Bauran Kebijakan Moneter-Fiskal Terhadap Pencapaian Target Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Tulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analisis yakni mengkaji bauran antara kebijakan moneter-fiskal terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menganalisa data sekunder yang relevan. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa, kebijakan moneter—fiskal sama sama penting dalam pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kedua kebijakan tersebut yang harus sinkron tidak saling melemahkan satu sama lain.

Demikianlah pengantar redaksi atas 6 (enam) tulisan yang tersaji dalam *Jurnal Kajian* edisi kali ini. Redaksi berharap agar semua tulisan yang tersaji pada edisi kali ini dapat memberikan inspirasi, menjadi bahan informasi, serta menjadi alternatif solusi dalam proses pengambilan keputusan dan/atau bagi pembaca secara keseluruhan yang tertarik dengan isu-isu dimaksud. Namun demikian, redaksi menyadari jika masih terdapat beberapa kekurangan yang mungkin tersaji dalam edisi kali ini. Untuk itu redaksi berharap agar pembaca memberikan masukan atas sajian jurnal ini pada umumnya dan tulisan-tulisan ini pada khususnya. Redaksi mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Syamsudin Haris, M.Si., Dr. Suhartoko, S.E., M.E., Dr. Ardi Adji, S.Si., M.Si., dan Lilis Mulyani, S.H., M.H., sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam *Jurnal Kajian* edisi kali ini.

Jakarta, Juni 2015

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Nomensen ST. Mambraku (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cendrawasih)

PENYELESAIAN KONFLIK DI TANAH PAPUA DALAM PERSPEKTIF POLITIK

Kajian Vol. 20, No. 2, Tahun 2015, hlm. 75-85

Ada lima rekomendasi kebijakan yang dihasilkan studi ini dalam rangka penyelesaian konflik di tanah Papua. Rekomendasi tersebut adalah: *Pertama*, melakukan pembatasan luas, intensitas dan keterbukaan konflik politik di tanah Papua secara persuasif. *Kedua*, menyelesaikan konflik politik di tanah Papua secara institusional melalui lembaga-lembaga negara yang ada, di antaranya pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Rakyat Papua. *Ketiga*, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat melanggar Hak Asasi Manusia, hukum dan perundangan yang berlaku. *Keempat*, menciptakan stabilitas konsensual. *Kelima*, menghasilkan resolusi konflik dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Rekomendasi kebijakan tersebut diharapkan mampu untuk menyelesaikan sumber konflik di tanah Papua, yaitu: 1) perbedaan persepsi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat 1969, dan 2) perbedaan persepsi proses pembangunan. Studi ini menyimpulkan bahwa ternyata sebagian besar kebijakan diambil oleh pemerintah sejak periode Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi masih jauh dari harapan. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan menganalisis pola, arah dan efektivitas kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintahan. Selain itu, disimpulkan juga bahwa pendekatan koersif-represif walaupun dengan intensitas yang berbeda masih tetap berlangsung di tanah Papua sejak tahun 1962 sampai sekarang.

Kata kunci: konflik politik, resolusi konflik, Papua, resolusi damai, MRP.

**EVALUASI PENYELENGGERAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF 2014:
STUDI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

Kajian Vol. 20, No. 2, Tahun 2015, hlm. 87-108

Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) tahun 2014 lalu berlangsung sukses dan berhasil memilih sejumlah anggota DPR RI dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota periode 2014-2019 dari 12 (dua belas) partai politik peserta pemilu. Dalam pelaksanaannya ditemui berbagai persoalan di hampir setiap tahapan sejak pemutakhiran daftar pemilih hingga penetapan calon terpilih. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang mencoba mengurai berbagai persoalan tersebut dengan kasus di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Bangka Belitung. Berbagai persoalan tersebut harus diatasi dengan solusi yang komprehensif yang membutuhkan perhatian dari seluruh *stakeholders* melalui pemetaan masalah dan dibuat *standard operating procedure*-nya. Pada akhirnya harus dilakukan evaluasi melalui perbaikan aturan yang dikodifikasi antar UU tentang kepemiluan.

Kata Kunci: pemilu legislatif 2014, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, DPR, DPD, DPRD.

Irfan Nur Rachman (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara serta Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG SUMBER DAYA AIR**

Kajian Vol. 20, No. 2, Tahun 2015, hlm.109-128

Pada 2004, terdapat beberapa permohonan yang menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 8/PUU-III/2005. Pada 2013, ada sejumlah Pemohon yang kembali mempermasalahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan permohonannya dicatat dengan registrasi Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013. Pada perkara ini, akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah pada pengujian sebelumnya Undang-Undang Sumber Daya Air dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Sumber Daya Air memiliki beberapa implikasi hukum, yaitu pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perairan yang telah dicabut, perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Peraturan Pemerintah, dan adanya perumusan konsep penguasaan negara tentang pengelolaan sumber daya air berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

Kata kunci: mahkamah konstitusi, Keputusan MK, uji konstitusional, sumber daya air, implikasi hukum.

Indra Cahyadi (Universitas Trunojoyo Madura)

**TANTANGAN INTERNASIONALISASI UKM DI INDONESIA
DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Kajian Vol. 20, No. 2, Tahun 2015, hlm. 129-143

UKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Rancangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan integrasi ekonomi di wilayah ASEAN secara cepat dan terarah. Maka, UKM perlu melakukan proses internasionalisasi untuk menghadapi MEA 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh UKM Indonesia dalam proses internasionalisasi. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumen, dan menemukan bahwa berbagai dukungan pemerintah belum mampu mendukung internasionalisasi UKM Indonesia secara maksimal.

Kata Kunci: UKM, usaha kecil menengah, internasionalisasi UKM, integrasi ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN 2015.

TELAAH KEBIJAKAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN DI INDONESIA

Kajian Vol. 20, No. 2, Tahun 2015, hlm. 145-162

Indonesia memiliki potensi laut dan perairan yang sangat besar, termasuk di dalamnya potensi sumber daya ikan yang banyak dimanfaatkan oleh nelayan dan pembudi daya ikan. Namun, potensi tersebut tidak berbanding lurus dengan kehidupan pelaku usahanya. Nelayan dan pembudi daya ikan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, dan untuk meningkatkan status ekonominya diperlukan perlakuan khusus melalui sejumlah instrumen perlindungan. Tujuan dari peulisan ini adalah: (1) menelaah peraturan perundang-undangan saat ini ada mengenai perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan; (2) memberikan batasan subjek yang mendapat perlindungan; dan (3) menentukan kebijakan mengenai perlindungan nelayan dan pembudi daya ikan. Paradigma yang digunakan adalah perlindungan terhadap pemanfaat utama sumber daya perikanan (*fisheries beneficiary*), bukan sumber daya pesisir (*coastal beneficiary*). Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif analisis, melalui penelusuran literatur dan riveu terhadap kebijakan terkait, dan dianalisis secara kualitatif. Nelayan kecil, buruh nelayan, nelayan yang memiliki kapal paling besar 5 GT, atau pembudi daya ikan kecil sebagai nelayan dan pembudi daya ikan yang wajib diberikan perlindungan oleh negara. Nelayan dan pembudi daya ikan harus dilakukan sebagai pekerjaan utama, dan bukan pekerjaan sampingan, apalagi sampingan tambahan. Oleh karena itu, pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilakukan dengan cermat. Instrumen perlindungan yang diberikan berbentuk: kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, kemudahan memperoleh sarana dan prasarana, jaminan terhadap resiko kegiatan usaha, dan pemberian bantuan hukum terhadap nelayan yang mengalami permasalahan terkait kegiatan penangkapan ikan di wilayah perbatasan. Hal penting lainnya adalah segera diratifikasinya Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Kata kunci: nelayan, pembudi daya ikan, sumber daya ikan, kemiskinan, perlindungan.

BAURAN KEBIJAKAN MONETER-FISKAL TERHADAP PENCAPAIAN TARGET INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Kajian Vol. 20, No. 2, Tahun 2015, hlm. 163-182

Kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua kebijakan ekonomi utama dalam perekonomian dan mempengaruhi kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan moneter terkait dengan upaya bank sentral—sebagai otoritas moneter untuk mencapai target inflasi (*inflation targeting*). Salah satunya adalah dengan mengelola uang beredar (M1 dan M2) di masyarakat melalui kebijakan suku bunga perbankan (*BI-Rate*). Sedangkan kebijakan fiskal terkait dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi (PDB) melalui peran fiskal dalam belanja pemerintah (*government expenses*). Kedua kebijakan tersebut harus sejalan atau sinkron agar target inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Tulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analisis yakni mengkaji bauran antara kebijakan moneter-fiskal terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menganalisa data sekunder yang relevan. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa, kebijakan moneter—fiskal sama- sama penting dalam pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kedua kebijakan tersebut yang harus sinkron tidak saling melemahkan satu sama lain.

Kata kunci: kebijakan moneter, kebijakan fiskal, moneter-fiskal, target inflasi, pertumbuhan ekonomi, Indonesia.

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Nomensen ST. Mambraku (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cendrawasih)

PAPUA CONFLICT RESOLUTION FROM POLITICAL PERSPECTIVE

Kajian Vol. 20, No. 2, Tahun 2015, pp. 75-85

This study offers five recommendations for a peaceful conflict resolution in Papua, emphasising political openness and persuasion, the role of local authorities and Papuan People's Council, as well as imposing sanction to perpetrators of grave human rights violations and creating stability and an effective mechanism. These recommendations are expected to be able to diminish the sources of conflict in Papua which caused by different perceptions on the 1969 Pepera implementation and development policies and approaches. With the use of pattern and direction analysis, and analysis of policy effectiveness of every period of government since the Old Order, this study concludes that the majority of policies introduced by the government are far from expected. This study also found that coercive-repressive approach continues to occur in Papua.

Keywords: political conflict, conflict resolution, Papua, peaceful resolution, MRP.

Indra Pahlevi (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI)

EVALUATION OF THE 2014 LEGISLATIVE ELECTION: STUDY OF SOUTH KALIMANTAN AND BANGKA BELITUNG PROVINCES

Kajian Vol. 20, No. 2, Tahun 2015, pp. 87-108

The 2014 legislative elections have been accomplished to elect DPR, DPD and DPRD members, at provincial and municipality levels, of 12 political parties contested. Several problems in every level of election are reportedly found since the registration of voters and official announcement of MPs candidates. From field research, this study reveals problems found in the provinces of South Kalimantan and Bangka Belitung. The writer said that all the problems should be comprehensively responded by all stakeholders in the legislative elections both by introducing appropriate solutions, for instance, by preparing and practicing a better of standard of operating procedure. Another evaluation recommends the codification of better laws on elections and their implementing rules.

Keywords: legislative election 2014, South Kalimantan, Bangka Belitung, DPR, DPD, DPRD.

Irfan Nur Rachman (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara serta Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamahh Konstitusi Republik Indonesia)

**LEGAL IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT'S DECISIONS
ON THE JUDICIAL REVIEW OF LAW ON WATER RESOURCES**

Kajian Vol. 20, No. 2, Tahun 2015, pp. 109-128

In the 2004 judicial reviews of Law Number 7/2004 on Water Resources, the Indonesian Constitutional Court has rejected several petitions with the Constitutional Court Decisions Number 058-059-060-063/PUU-II/2004 and the Constitutional Court Decisions Number 8/PUU-III/2005. Meanwhile, in 2013, the Constitutional Court received again applicants who repudiate the substances of the law, which has been then registered as Case Number 85/PUU-XI/2013. Different with the previous case, on this case, the Constitutional Court has won the request and finally come to the conclusion that the law is contrary with the 1945 State Constitution, thus, it has no binding legal force. The Decisions which mentioned as the Constitutional Court Decisions Number 83/PUU-XI/2013 which overall revoke Law Number 7/2004 on Water Resources bring about legal implications. Several implications of them require, among others, the re-enactment of Law Number 11/1974 on Water Territory which has been earlier revoked and the expansion of the Constitutional Court's authority in reviewing Government Regulation, and the formulation of concept of "water resources under state control".

Keywords: constitutional court, constitutional court decision, judicial review, water resources, legal implications.

Indra Cahyadi (Universitas Trunojoyo Madura)

**CHALLENGES OF INTERNATIONALIZATION OF INDONESIA'S
SMES TOWARDS ASEAN ECONOMIC INTEGRATION**

Kajian Vol. 20, No. 2, Tahun 2015, pp. 129-143

SMEs role plays important role in economic development of Southeast Asia countries, in particular in the realization of the ASEAN Economic Integration 2015, which is intended to rapid- and properly increase their deeper integration and competitive power position. For this reason, SMEs needs to begin with international standards or parameter in their production process, suitably with ASEAN market that will be implemented in 2015. This essay is produced from a research conducted to recognize challenges facing by the country's SMEs in the process of its internationalization in the region. The research used a qualitative method, with which data gathering conducted through in-depth-interview, observation, and document analysis. Its findings reveal that the government supports still have not yet been able to hugely facilitate the process of the internationalization.

Keywords: SMEs, small scale industries, ASEAN integration, MEA 2015.

STUDY ON PROTECTION OF FISHERMEN AND FISH FARMERS IN INDONESIA

Kajian Vol. 20, No. 2, Tahun 2015, pp. 145-162

Indonesia has the very large of thesea and thewaters, including the potential of many fish resoures exploited by fisherman and fish farmer. However, this potential is not proportional to the offender's life business. Fishermen and fish farmer have very high levels of poverty, and to improve their economic status required special treatment through a number instuments of protection. The purpose of this study is: (1) examine the existing legislation regarding the protection of fisherman and fish farmer; (2) imposes limits of subjekct to get protection; and (3) determine policies regarding the protection of fishermen and fish farmer. The paradigms used in this study are the main beneficiaries of the protection of fishery resources, instead od coastal benefiiciares. The method used is descriptive method of analysis, through a literature search, and review of relevant policies, and analyzed qualitatively. Small fishermen, fishermen labour, fishermen who have the biggest boats than 5 GT, or small fish farmer as a fishermen and fish farmer must be given protection by the state. Fishermen and fish farmer must be done as the man occupation, and not the odd jobs, let alone the additional sideline. Therefore, data collection undertaken by the Goverment and local goverment must be done carrefully. Instrumen of protection provided such as; the certainty of business, abolition of the practice of hight-cost economy,access to ficilities and infrastructure, assurance againts the risk of business activities, and the provision of legal assistance to fishermen who have problems related to fishing activities in the border region. Another important thing is ratification The International Labour Organization (ILO) Convention Number 188 of the Work in Fishing promptly.

Keyword: fishermen, fish farmer, fish resources, poverty, protection.

MONETARY AND FISCAL POLICIES MIX ON ACHIEVING INFLATION TARGETING AND ECONOMIC GROWTH

Kajian Vol. 20, No. 2, Tahun 2015, pp. 163-182

As main macroeconomic policies, monetary and fiscal policies give influences to economic activities on the whole. One of the monetary economic policies is aimed to reach inflation target which can be realized by the Central Bank by applying interest rate approach in order to control money supply. Meanwhile, fiscal policy is planned to achieve economic growth by emphasizing fiscal role in government spending. The writer argues that both macro-economic policies must be synchronized and integrated so that they can meet the main goal to reach both targets above. This essay is a descriptive analysis using secondary data applying a qualitative approach. The writer came to conclusion that a stable integration of monetary and fiscal policies can effectively help Indonesia reach its inflation and growth targets simultaneously.

Keywords: monetary policy, fiscal policy, monetary-fiscal policies, inflation target, economic growth, Indonesia.